

Memberantas Korupsi dengan Metode Jakarta

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Metode Jakarta, atau "*The Jakarta Method*", adalah istilah yang populer di negara-negara Amerika Latin pada tahun-tahun 1960-1970-an. Menurut *Vincent Bevins*, jurnalis Amerika Serikat yang menulis buku tentang hal ini, setelah tragedi 1965-1966 di Indonesia, di negara-negara Amerika Latin istilah tersebut dipopulerkan antara lain dengan coretan-coretan (*graffiti*) di tembok-tembok kota dalam berbagai bahasa. Jenderal *Rios Montt* dari Guatemala yang dikutip dalam buku *Bevins*, mengatakan bahwa Metode Jakarta adalah seperti metode penangkapan ikan di laut. Komunis adalah ikannya, rakyat adalah lautnya. "Jika sulit menangkap ikannya, maka keringkan saja lautnya", katanya. Metode yang sama sekarang kita lihat digunakan Israel di Gaza dan Lebanon Selatan untuk menghabisi Hamas dan Hizbullah, dan mungkin akan digunakan *Donald Trump* di Iran untuk menghabisi Garda Revolusi. Jika Israel tidak menggunakan Metode Jakarta, maka akan terjadi bipolarisasi yang jalan keluarnya adalah solusi dua negara (*two state solution*) yang tidak pernah akan disetujui oleh pihak Israel. Solusi dua negara ini terjadi di Jerman seusai Perang Dunia Kedua, terjadi di Semenanjung Korea, bipolarisasi Cina – Taiwan, Vietnam Utara – Vietnam Selatan sebelum kekalahan Amerika Serikat, dan Timor Timur – Timor Barat seandainya Indonesia tidak menggunakan Metode Jakarta pada jaman Orde Baru. Metode ini dinamai Metode Jakarta, karena paling sukses diterapkan di Indonesia. Komunis dan komunisme dihabisi sampai ke akar-akarnya, dan Indonesia tetap bersatu, tidak terjadi bipolarisasi pro-komunis - anti-komunis.

Kisah sukses Metode Jakarta dalam memberantas komunis dan komunisme bisa diusulkan untuk diulangi sekarang dalam rangka pemberantasan korupsi dan koruptor. Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) langkah strategis yang dapat dilakukan, sesuai pelajaran sejarah yang diperoleh dari penerapan Metode Jakarta pada tahun 1965-1966 di Indonesia, serta di belasan negara lain di Amerika Latin dan benua Afrika. Langkah pertama adalah melakukan agitasi, propaganda dan "*brainwash*" agar rakyat meyakini bahwa korupsi itu seburuk-buruk perilaku dan koruptor itu seburuk-buruk pelakunya, sehingga layak dibasmi seperti hama penyakit atau serangga. Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan upaya kudeta pada tahun 1948 di Madiun. Tapi berkat agitasi dan propaganda-nya, pada tahun 1955 PKI malah menduduki peringkat ke-empat dalam Pemilihan Umum yang pertama. Setelah itu Amerika Serikat, yang memang sedang melancarkan agitasi dan propaganda anti-komunis hampir di seluruh dunia, mensponsori agitasi dan propaganda anti-PKI, sehingga ketika terjadi peristiwa G-30-S, tuduhan dengan mudah diarahkan kepada PKI sebagai "dalang" di balik peristiwa itu.

Langkah strategis yang kedua adalah mengirim putera-puteri terbaik, khususnya aparat penegak hukum (APH) ke negara2 yang "bersih" untuk mempelajari prinsip anti-korupsi dan berbagai operasi pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Pada masa lalu, langkah strategis seperti ini dilaksanakan dengan mengirim perwira-perwira TNI yang terbaik untuk mendapatkan doktrin anti-komunis ke akademi militer Fort Leavenworth, negara bagian Kansas di Amerika Serikat. Di sana berkumpul perwira-perwira militer anti-komunis dari seluruh penjuru dunia, untuk mempelajari berbagai model operasi militer pemberantasan komunisme dan komunis. Bukan mustahil di Fort Leavenworth-lah Metode Jakarta mulai digagas bersama oleh para perwira militer yang datang dari segenap penjuru dunia itu, walau pun mungkin belum disebut sebagai Metode Jakarta.

Dulu, ketika Metode Jakarta pertama kali diterapkan untuk memberantas komunis dan komunisme di Indonesia, belum terlalu berkembang issue pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga langkah strategis ketiga dan keempat hampir tidak ada yang mempersoalkan. TNI/Polri yang dulu masih tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan leluasa menjemput-paksa atau memanggil para komunis, kemudian melenyapkannya. Untuk sekarang ini, langkah strategis ketiga bisa dilakukan dengan membuka cabang dan ranting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai ke desa-desa, yang punya wewenang penuh untuk memanggil orang yang dicurigai sebagai koruptor, kemudian "melenyapkan"-nya dengan segala cara. Kalau cukup banyak koruptornya, bisa digiring ke tepi pantai ramai-ramai terus di-eksekusi seperti mereka yang dicurigai sebagai anggota PKI atau simpatisannya, di berbagai wilayah, khususnya di Pulau Bali.

Langkah strategis yang keempat dapat menjadi alternatif atau tambahan dari langkah strategis ketiga. Jika terlalu banyak koruptor yang tertangkap sampai rumah tahanan semua penuh, maka bisa dicarikan pulau-pulau terpencil (seperti pulau Buru untuk para tahanan politik atau "tapol" dulu) lalu semua koruptor dibuang ke sana. Selama ini, lembaga peradilan terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera bagi para koruptor. Olehnya itu, untuk para koruptor yang sudah jelas korupsinya, seperti dulu para "tapol" yang sudah jelas komunis, tinggal diberikan dua pilihan saja, apakah mau dilenyapkan, atau dikucilkan dan dibuang ke pulau terpencil. Jika dulu keempat langkah strategis dalam Metode Jakarta terbukti efektif dalam memberantas komunisme dan komunis, tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh dunia, maka metode yang sama – dengan berbagai modifikasi yang diperlukan – seharusnya juga akan efektif untuk memberantas korupsi dan koruptor.

Gunung Batu, 20 Juli 2026